

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Setelah kemerdekaan Indonesia identitas politik Indonesia belum terbentuk karena belum mempunyai presiden serta wakil presiden, sehingga untuk terbentuknya konstitusi para tokoh menyusun mengenai kehidupan bernegara. Dengan diadakannya rapat kepanitiaannya PPKI. Setelah kemerdekaan tentara Inggris dengan bergabung ke AFNEI selaku wakil sekutu tiba di Indonesia, bermaksud untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Karena kedatangan sekutu menimbulkan beberapa pertempuran oleh karena itu dilakukan upaya diplomasi untuk mengatasi pertempuran namun dalam prosesnya tidak banyak membawa hasil. Hasil akhir dari diplomasi melalui perjanjian KMB yaitu terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dibubarkan karena banyak pergolakan yang dilakukan diberbagai wilayah Indonesia.

Awal mula pertentangan Soekarno-Hatta dimulai pada masa tahun 1932-1933, kedua tokoh tersebut mulai berpolemik walaupun benih-benihnya mulai muncul sejak 1929, meski tidak secara langsung. Sifat dan karakter kedua tokoh ini juga saling bertolak belakang. Bung Karno seorang yang *Extrovert* Bung Hatta *Introvert*. Bung Karno adalah orang yang orator serta ulung sedangkan Bung Hatta merupakan orang yang tenang, pendiam, dan bersifat pendidik. Pertentangan berlanjut pada masa persiapan naskah UUD 1945, pasca sidang PPKI, dan pada masa demokrasi parlementer. Dampak dari pertentangan antara Soekarno dan Hatta terhadap sistem pemerintahan Indonesia adalah fluktuasi dalam konstitusi

Indonesia, yang mengalami beberapa pergantian sebagai akibat dari pertentangan antara kedua tokoh politik tersebut.

Akibat dari pertentangan Soekarno Hatta terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu konstitusi di Indonesia mengalami pasang surut dimana terjadi berapa kali pergantian akibat dari pertentangan kedua tokoh politik tersebut. Awal mulanya berlaku UUD 1945, selanjutnya berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949). Namun, tidak berlangsung lama, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Kemudian dalam perkembangan UUDS 1950. Serta puncak dari pertentangan ini mundurnya Hatta sebagai wakil presiden pada tahun 1956.

5.2 Saran

Dilakukannya penulisan ini, penulis berharap agar menjadikan contoh kedua tokoh tersebut karena dalam walaupun berbeda pendapat dan berbeda pemikiran namun rasa nasionalisme kedua tokoh tersebut sangat tinggi sehingga walaupun kerap berselisih tidak saling mencaci, tidak menimbulkan keributan, karena memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai Indonesia merdeka dan membangun bersama untuk masa depan bangsa.

Sebagai sebuah penelitian sejarah, penulis berharap agar penelitian yang sama tetap dilanjutkan terutama bagi generasi muda di Indonesia. Sebab dengan pengungkapan sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia Pasca Proklamasi yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno-Hatta dapat menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia dan konflik yang terjadi pada tahun 1945-1956.

Penulis pun menyadari bahwa upaya ini belum dapat menghadirkan nuansa sejarah konflik pada masa Soekarno-Hatta yang terjadi Pasca Proklamasi di

Indonesia secara keseluruhan, oleh karena luasnya dimensi-dimensi kehidupan sosial politik rakyat Indonesia perlu diungkapkan, disamping itu juga karena keterbatasan kemampuan penulis.

Bagi peneliti lain mempeluas objek penelitian terhadap Soekarno-Hatta mengingat pertentangan ini hanya merupakan sebagian kecil dari semua masalah yang dianalisis dalam cerita tersebut. Diharapkan mampu lebih mengembangkan dalam hal yang berkaitan dengan Soekarno-Hatta dalam pertentangan.